

BAB III

BANTUAN AUSTRALIA DI INDONESIA

Bab ini berbicara mengenai program bantuan Australia yang difokuskan terhadap Indonesia. Mengenai program-program serta anggaran yang diberikan Pemerintah Australia untuk kepentingan bantuan terhadap Indonesia beserta tujuan, kebijakan Indonesia mengenai dana bantuan dan dampak bantuan itu sendiri terhadap Pemerintah Indonesia.

A. Sejarah Bantuan Australia di Indonesia

Sejak awal tahun 1950-an, Australia dan Indonesia telah menjalin Kemitraan Program Kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia (AIDCP) dalam beberapa bidang termasuk bidang pendidikan. Dimulai dengan beasiswa yang didanai oleh *Colombo Plan*, program tersebut terus berkembang disesuaikan dengan alur Indonesia yang berubah-ubah. Australia terus memberikan bantuan ke Indonesia salah satunya dengan pemulihan Indonesia dari krisis tahun 1990-an serta dengan permasalahan keamanan.

Australia mulai intensif memberikan bantuan ke Indonesia sejak era Orde Baru, dimana pada masa tersebut Presiden Soeharto membuka diri seluas-luasnya untuk memperoleh bantuan asing bagi infrastruktur di Indonesia. Pada tahun 1966 kala itu, Program bantuan Pemerintah Australia dan kegiatan sektor swasta serta badan-badan sukarela dinilai berdasarkan signifikansi politik. Isu-isu tersebut telah menghasilkan memanasnya perpolitikan antara kedua negara yang berimbas pada keadaan internal Indonesia. (Eldridge, 1979)

Bencana Tsunami pada 24 Desember 2006 membuat Australia menyadari bahwa Indonesia merupakan kawasan yang rentan akan bencana alam, maka bantuan jangka 5 tahun melalui perjanjian bilateral antar kedua negara, seperti Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi

dan Pembangunan (AIPRD). Serta rencana pemerintah Australia untuk membantu manajemen ekonomi Indonesia, transisi demokrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut mencerminkan kepentingan pribadi Australia dimana peningkatan standart kehidupan dan stabilitas Indonesia menjanjikan perluasan peluang perdagangan dan investasi antar kedua negara.

Keadaan ekonomi dunia yang semakin menguat telah membantu Indonesia dalam mengangkat pertumbuhannya, meski begitu lebih dari setengah jumlah penduduknya yang sebanyak 220 juta jiwa, mayoritas berpenghasilan kurang dari \$ 2 per hari, hal tersebut juga berkaitan dengan investasi dalam modal manusia dan infrastruktur yang tetap tidak memadai. Masalah lain yang ditemukan adalah konflik di pinggir negara serta permasalahan pengangguran serta akses layanan kesehatan, pendidikan dan juga fakta-fakta lainnya. Hal tersebut menjadikan AusAID telah menemukan langkah untuk membantu pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan peningkatan produksi dan iklim investasi.

Pada 1 Mei 2006, Program bantuan Australia di Indonesia dipromosikan dengan sebutan *Australia – Indonesia Partnership (AIP)* yang merupakan program bantuan keseluruhan dari Pemerintah Australia senilai A\$ 2 miliar untuk periode lima tahun untuk rekonstruksi dan pembangunan yang merupakan bantuan terbesar sepanjang sejarah Australia (Maulidina, Pengukuran Kinerja Program Government Partnership Fund, 2009).

Hubungan erat antara Australia dan Indonesia dipererat oleh kerjasama pembangunan, hal tersebut lantaran kedua negara memiliki harapan yang sama mengenai pewujudan kawasan yang damai, stabil dan makmur. Guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang terakit mengenai ancaman-ancaman kejahatan, kesehatan lintas negara, dan juga permasalahan lingkungan hidup termasuk bencana alam yang sudah menjadi salah satu permasalahan pokok di Indonesia sebagai wilayah rawan bencana.

Pada pengembangan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia 2008-2013, hubungan erat kedua negara memaparkan rencana kedepan dengan memadukan berbagai pencapaian kemajuan serta pelajaran-pelajaran berharga yang bisa menjadi acuan. Strategi tersebut merupakan keberlanjutan dari bantuan Australia ke Indonesia senilai \$ 1 miliar melalui program *Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD)* yang digunakan untuk rekonstruksi dan infrastruktur Aceh pasca-Tsunami, namun juga digunakan untuk pembangunan skala besar di daerah-daerah lainnya yang telah disepakati oleh kedua negara .

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, ODA Australia kepada Indonesia mengalami peningkatan, terutama sejak gempa bumi dan Tsunami melanda wilayah Aceh. Dalam kurun periode 2002-03, bantuan pembangunan Australia ke Indonesia meningkat sebanyak 315%, dari \$ 130.7 juta pada tahun 2002-03 menjadi sekitar \$ 887,7 juta. Sejak periode 2011-12, Indonesia telah mengambil alih peringkat tertinggi penerima bantuan Australia dari Papua Nugini.

Periode Pemberian Bantuan	Anggaran ODA Australia ke Indonesia
2012-13	\$ 887.7 juta
2013-14	\$ 601.6 juta
2014-15	\$ 551.9 juta
2015-16	\$ 375.7 juta
2016-17	\$ 357.0 juta

Tabel 2 : Anggaran ODA Australia ke Indonesia periode 2013-2016 (sumber : DFAT)

Dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan Australia mengenai ODA pada Pemerintahan Koalisi tahun 2013, Australia mengarahkan bantuannya dengan menjalin kemitraan ekonomi dengan Indonesia dan mendukung upaya Indonesia untuk mengatasi permasalahan kesenjangan, menjaga stabilitas sosial, mempromosikan toleransi dan pluralism, serta melawan tindak kekerasan dan ekstremisme. Australia menganggap bahwa Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan telah mencapai kemajuan pembangunan yang substansial. Oleh karena itu, Australia mengarahkan ODA ke Indonesia dengan kebijakan baru melalui kerangka *Australia Aid Investmen Plan 2015-16 to 2018-19* yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015-19 (RPJMN).

Program tersebut berada dibawah Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) dan menetapkan visi serta prioritas terhadap Indonesia. Terdapat sembilan bidang prioritas yang difokuskan pada kawasan Indonesia bagian timur untuk membantu mengatasi disparitas regional dalam pembangunan dan menyeimbangkan dengan perkembangan di wilayah lain Indonesia. AIP memiliki tujuan untuk memastikan pencapaian pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dengan mencapai target-target pembangunan yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia sebagai bentuk realisasi komitmen Australia dalam agenda pembangunan internasional yang telah disepakati.

Hasil dari AIP akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh komitmen negara-negara donor dan negara-negara berkembang serta taget *Millennium Development Goals* (MDG) yang tertuang dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* yang berkomitmen terhadap proyek yang diberlakukan sistem pemerintah negara mitra untuk memastikan negara tersebut supaya gagasan-gagasan tersebut mampu berjalan berkelanjutan. Dalam pendampingan program tersebut, Australia memiliki tiga tujuan utama, diantaranya adalah :

- **Institusi dan Infrastruktur yang Baik**

Pengembangan institusi dan infrastruktur ekonomi sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Australia memberikan dukungan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan pekerjaan produktif melalui penyempurnaan kebijakan public dan pengaturannya. Australia mengupayakan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dengan mendukung stabilitas sektor keuangan, mobilisasi pendapatan, peningkatan belanja pemerintah dan pengumpulan pajak.

Australia memberikan bantuan dorongan investasi dan pertumbuhan infrastruktur melalui bantuan teknis serta sarana kebijakan mengenai peraturan, perencanaan, dan evaluasi. Pendekatan multifaset termasuk penggunaan sumber daya pemerintah yang lebih efisien, pemilihan dan persiapan proyek yang cermat dan kemitraan produktif antara sektor public dan swasta agar menghasilkan pembangua infrastruktur yang lebih baik.

- **Pengembangan Manusia untuk Masyarakat yang Produktif**

Australia memberikan program pendidikan inovatif yang bekerja dengan sekolah untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk melakukan pengembangan pendekatan baru terhadap penyelesaian masalah. Australia memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia yang produktif pada berbagai bidang yang relevan dengan ekonomi dan pembangunan. Serta melakukan kerjasama terhadap penangana penyakit menular yang muncul untuk kepentingan bersama kedua negara.

- **Mayarakat yang Inklusif Melalui Pemerintah yang Efektif**

Kerjasama Australia dengan Indonesia untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, membantu pemenuhan target

penanggulangan kemiskinan Indonesia dengan meningkatkan layanan dasar serta peluang kerja. Australia membantu mengembangkan kebijakan perlindungan ekonomi dan sosial yang berkualitas yang lebih baik berdasarkan penelitian dan analisis.

Australia melakukan pengejaran terhadap program untuk pemberdayaan ekonomi dan perepuan dalam politik, yang akan membantu perempuan mendapatkan pekerjaan serta sumber financial lainnya. Memastikan kelompok marjinal memperoleh manfaat dari peningkatan akses dan dukungan disabilitas serta penyediaan layanan lokal yang lebih baik. Setelah itu, Australia juga akan membantu meningkatkan akses warga negara terhadap layanan hukum yang berakitan dengan keadilan serta dukungan untuk kontra-terrorisme serta reformasi penjara dan pengadilan. (Trade D. o., Overview of Australia's Aid Program to Indonesia, 2017)

Melalui pendekatan implementatif, Australia berupaya untuk menjalin kemitraan dengan sebaik-baiknya dengan beberapa Kementerian yang berkaitan untuk memperoleh hasil yang efektif. Australia memastikan diri terus terlibat secara teratur dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan bahwa prioritas Australia tetap selaras dalam kontribusi pada agenda pembangunan Indonesia.

Australia akan memilih lembaga pelaksanaan yang paling tepat dan secara ketat mengawasi keefektifan dan efisiensi kemajuan serta membuat keputusan terbaik dalam menangani kinerja yang buruk. Australia memastikan penyesuaian situasi yang ada dengan kebijakan baru mereka mengenai “*investasi*” serta mematuhi panduan visibilitas bantuan Australia sehingga bantuan kemitraan Australia memperoleh pengakuan dengan tepat.

B. Program-program Bantuan Australia di Indonesia

Kemitraan Australia dengan Indonesia memiliki fokus pokok guna memberikan *support* upaya reformasi ekonomi, infrastruktur, sosial dan lingkungan jangka panjang di Indonesia, diantaranya adalah :

- Tata Kelola Ekonomi



Gambar 4 : <http://www.kerja-ngo.com/2016/03/aipeg-job-vacancy-macroeconomist.html> (diakses pada 5

Agustus 2018 PUKUL 19.41 WIB)

Kerjasama Australia dengan Lembaga Pemerintah Indonesia untuk menguatkan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan inklusif di Indonesia bernama *Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) yang bekerja memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan sektor keuangan dan meningkatkan efisiensi pasar.

- Infrastruktur



Gambar 5 : Workshop Program Dinas PUTR ke Kabupaten Lombok Barat untuk PRIM tahun 2017 (NTB, 2017)

Kemitraan Infrastruktur Australia Indonesia (KIAT) memberikan sarana teknis dibidang reformasi kebijakan dan peraturan , persiapan proyek, keuangan dan pengiriman, guna memberikan dorongan terhadap investor swasta untuk ikut andil dalam proyek Infrastruktur . Dukungan Australia kepada Indonesia untuk mempercepat investasi public dan swasta di bidang Infrastruktur dengan menyediakan teknisi dan ahli perencanaan, desain, pemeliharaan, dan penilaian dampak lingkungan supaya memberikan kemudahan pengiriman proyek infrastruktur dan keberlanjutan jangka panjang.

- Air, Sanitasi dan Kebersihan



Gambar 6 : Penggunaan Logo AusAID dalam Program PAMSIMAS (Pamsimas, 2013)

Australia memberikan hibah air dan sanitasi kepada Pemerintah Daerah untuk membantu investasi mereka dalam infrastruktur air dan sanitasi melalui koneksi baru. Program ini sekarang

sedang dilakukan perluasan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan dana sendiri yakni program PAMSIMAS Indonesia guna meningkatkan air, praktik sanitasi dan kebersihan didaerah pedesaan dan pinggiran kota.

- Pertanian



Gambar 7 : Kerjasama AIP-PRISMA dengan Kementerian PPN/Bppenas. (Bappenas, 2014)

Australia dan Indonesia bekerja bersama di sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Melibatkan pertukaran pengetahuan dan inovasi teknis juga kemitraan substansial dengan bisnis untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan sektor swasta. Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan (*AIP-PRISMA*) meningkatkan pendapatan petani kecil dengan berinvestasi bersama dalam model bisnis baru yang memberikan dampak baik bagi para petani dan bisnis. Membangun kemitraan dengan investor swasta, bank, dan juga lembaga penelitian untuk meningkatkan investasi irigasi, mengkomersilkan teknologi pertanian juga meningkatkan akses keuangan.

- Pendidikan



Gambar 8 : Gubernur NTB (TGB Zainul Majdi) menandatangani MoU dengan INOVASI (Palladium, 2016)

Kemitraan Australia dengan Indonesia untuk meningkatkan mutu bagi siswa dengan memberikan saran dan keahlian, melakukan pengujian pendekatan baru, serta menyumbangkan penelitian dan ide untuk meningkatkan kebijakan pendidikan. Australia menyediakan beasiswa untuk studi pascasarjana jangka pendek dan jangka panjang di universitas-universitas Australia melalui Australia Award di Indonesia (AAI). Australia juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) guna memahami apa yang dibutuhkan anak untuk meningkatkan hasil belajar dengan mengadaptasi solusi internasional untuk konteks lokal dan merancang, mengimplementasikan, dan menguji solusi tersebut.

- Kesehatan



Gambar 9 : Program Penguatan pada layanan Dokter Hewan di Indonesia (AIP-EID, 2015)

Kerjasama Australia dan Indonesia dalam upaya memerangi penyakit menular yang muncul dan mengurangi malnutrisi pada wanita hamil dan anak-anak. Kemitraan Australia-Indonesia untuk *Emerging Infectious Diseases* (AIP-EID) mendukung Organisasi Kesehatan Dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat, dan mendukung Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air Australia untuk meningkatkan manajemen darurat kesehatan hewan di Indonesia.

- Kesetaraan Gender



Gambar 10 : Penandatanganan PSAP MAMPU Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Pemberdayaan

Perempuan Fase II (PPN/Bappenas, 2017)

Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, kelompok perempuan dan sektor swasta untuk memperkuat suara perempuan dan memperkuat kesetaraan gender. Memberdayakan Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU), mendukung organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi reformasi kebijakan dan meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan dan program pemerintah di sektor perlindungan sosial, kondisi pekerjaan (termasuk bagi pekerja migrant di luar negeri), kesehatan dan gizi, dan mengurangi kekerasan terhadap wanita. Investing In Woman (IIW)

- Perlindungan Sosial dan Inklusi



Gambar 11 : Sosialisasi dan Pengacakan KIAT GURU dengan PEMDA KAIMANA dan TNP2K

(Katigade, 2014)

Dukungan Australia terhadap Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) guna memperkuat program nasional yang mendukung rumah tangga termiskin dan paling rentan. Menuju Masyarakat Indonesia yang Kuat dan Sejahtera (MAHKOTA) . Program-program dukungan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan akses ke layanan dan program pemerintah, melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan akses ke layanan dan program pemerintah bagi kelompok yang terpinggirkan.

- Layanan Lokal



Gambar 12 : Gelar Dialog KOMPAK dengan IPPMI Lampung (Lampung, 2015)

Kemitraan guna memastikan masyarakat yang paling miskin dan paling rentan mendapatkan manfaat dari target desentralisasi Indonesia. Governance of Growth (KOMPAK) untuk meningkatkan layanan dasar pada masyarakat.

- Hukum, Keadilan dan Keamanan



Gambar 14 : Konferensi Kemitraan Mencapai Keadilan Restoratif (AIPJ, 2018)

Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Keadilan (AIPJ) bekerja untuk memperkuat lembaga-lembaga peradilan, keamanan dan meningkatkan akses ke layanan dengan mendukung hubungan percaloan penelitian dan membangun kapasitas pemerintah di bidang transparansi, anti korupsi, melawan radikalisme, kejahatan transnasional dan reformasi penjara.

- Kebijakan Berbasis Bukti



Gambar 15 : Seminar LAN-KSI untuk Manajemen Peningkatan Kualitas Kebijakan (KSI-Indonesia, 2018)

Kerjasama guna memperkuat sarana kebijakan pembangunan di Indonesia guna menghasilkan bukti yang meyakinkan keefektifan kebijakan dan untuk menyampaikannya kepada pembuatan keputusan yang tepat di pemerintahan yakni Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kebijakan *Pro-poor Knowledge Sector Initiative* (KSI) .

- Manajemen Resiko Bencana



Gambar 16 : https://www.slideshare.net/pji_kemenkes/kb-1-konsep-bencana-47565649 (AusAid : Kemenkes, 2014)

Australia membantu memperkuat kemampuan Indonesia untuk menganggapi krisis kemanusiaan berskala besar dan membantu mengurangi resiko bencana termasuk mendukung kesiapsiagaan bencana melalui kebijakan, pelatihan dan teknologi yang tepat melalui Kemitraan Australia-Indonesia dan Manajemen Resiko Bencana (AIP-DRM).

- Perubahan Iklim dan Tata Kelola Lingkungan

Kerjasama Australia dan Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari konversi lahan, termasuk membantu mengatasi penyebab kebakaran hutan dan lahan melalui praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, meningkatkan investasi dalam energy bersih, pertanian cerdas iklim, dan inisiatif pertumbuhan hijau. (Australia Embassy Indonesia)

C. Tujuan Bantuan Australia di Indonesia

Pemerintah Australia menjelaskan dengan spesifik perihal *Aid Investment Plan Indonesia*, yang tertera dalam webside milik DFAT. Bahwa Indonesia merupakan prioritas dan rasionalitas

strategis Australia. Hal tersebut lantaran Indonesia merupakan tetangga dekat Australia yang dianggap sebagai mitra kunci hubungan bilateral, regional dan global. Dalam perspektif Australia, Indonesia dianggap sebagai negara yang makmur, stabil, dan memiliki perkembangan stabilitas yang baik, aspek keamanan, perdagangan dan merupakan mitra kerjasama wilayah. Indonesia telah mencapai status pendapatan menengah serta telah mencapai kemajuan pembangunan substansial dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu tantangan yang dihadapi seperti proyek infrastruktur yang mengalami kemacetan serta defisit keterampilan dan kelemahan institusional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Australia bekerjasama dengan Indonesia dengan menargetkan kendala mendasar bagi pertumbuhan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia, dimana Australia menempatkan diri untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan sebagian besar nilainya. Solusi yang digunakan Australia untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menyesuaikan program yang buat agar memperkuat inisiatif yang secara langsung memberikan dukungan diplomasi ekonomi serta bantuan untuk perdagangan dengan harapan memberikan kontribusi terhadap target 20 persen dibawah tujuan *Strategy for Australia's Aid for Trade Investment by 2020*.

Program tata kelola ekonomi dijadikan prioritas sebagai proporsi pembelanjaan program serta dukungan Australia terhadap infrastruktur akan manfaat belanja infrastruktur Indonesia itu sendiri serta meningkatkan kualitas public dan proyek infrastruktur bank multilateral. Australia terus memastikan fokus terhadap pengembangan sektor swasta di keseluruhan dalam investasi yang diberikan. Australia juga berkomitmen untuk mengatasi kendala pada peningkatan kapasitas perempuan dalam partisipasinya terhadap aktivitas ekonomi dan politik. Peningkatan kualitas manusia (SDA) masih tetap menjadi fokus namun Australia memilih sikap untuk bergeser dari

investasi fisik menuju dukungan untuk perubahan sistematis dan kapasitas Indonesia untuk memperbaiki kualitas layanannya.

Australia mengklaim bahwa pendekatan yang disampaikan secara politis tersebut dan kebijakan pemangkasan dana bantuan yang dilakukan terhadap Indonesia merupakan upaya untuk meninggalkan model bantuan tradisional menuju kemitraan yang lebih matang, yakni kemitraan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya Indonesia yang substansial. Kurang lebih \$ 320 juta per tahun, dana bantuan Australia yang diberikan kepada Indonesia akan mewakili kurang dari 0,3 persen pendapatan Pemerintah Indonesia yang merupakan bentuk dari reformasi katalitik. (Government, Aid Investment Plan Indonesia : 2015-16 to 2018-19, 2015)

Kepentingan Nasional Australia di Indonesia

Hubungan Australia dan Indonesia yang fluktuatif membawa arah hubungan diantara kedua Negara bertetangga dekat tersebut bisa dikatakan sangat dipengaruhi oleh karakter pemimpin dari keduanya. Indonesia pada masa lalu bahkan tidak memberikan pengaruh strategis ketika Jepang merebut Indonesia dari Belanda dan saat Jepang melakukan serangan terhadap Australia dari wilayah Indonesia. Australia untuk pertama kalinya menganggap bahwa Indonesia merupakan tetangga dekat yang menjadi ancaman pasca Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan meski dalam keadaan serba terbatas.

Dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, Australia menganggap Indonesia tetap miskin dan lemah secara militer terutama di zona laut. Pada kepemimpinan Soeharto tahun 1967, ia menggeser rezim nasionalis Soekarno dengan kebijakan luar negeri yang lebih berhati-hati dan konstruktif. Soeharto mengembangkan hubungan regional melalui Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan mendorong hubungan yang hangat dengan Australia.

Meski begitu, Indonesia tidak pernah kehilangan tempat khusus dalam perencanaan pertahanan Australia. Dalam satu setengah dasawarsa pasca Vietnam, ketika misi militer Angkatan Pertahanan Australia (ADF) terbatas pada pertahanan lokal, Indonesia tetap menjadi satu-satunya ancaman yang dimungkinkan. Sejak tahun 1970-an, angkatan bersenjata Australia memprioritaskan diri untuk pertahanan terhadap serangan tipuan di wilayah perbatasan oleh militer Indonesia.

Buku Putih Pertahanan 1994 menggambarkan dua hal yang diupayakan Australia dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, yakni posisi penting Indonesia sebagai pihak yang menjadi penyangga kekuatan Asia Tenggara dan juga Indonesia selaku benteng Australia dalam upaya-upaya penyerangan ataupun perdagangan akan melaluinya. Dalam “Buku Putih Pertahanan 2013” tertulis dengan jelas bahwa Australia menilai Indonesia sebagai salah satu *strategic partner* termasuk Tiongkok dan India yang mengalami perubahan ekonomi yang signifikan selama satu dekade, hal tersebut yang menyebabkan Australia merasa harus merancang dengan lebih spesifik mengenai ancaman keamanan dan pertahanan nasional negaranya. (Departemen Pertahanan, 2013)

Indonesia muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam tatanan regional Asia pasca Vietnam digulingkan lantaran Tiongkok menantang kekuatan Amerika Serikat. Dengan ekonomi yang dinamis dan potensi strategis yang berkembang, keseimbangan kekayaan dan kekuasaan antara Australia dan Indonesia telah mengubah cara Indonesia dalam menempatkan diri. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi lebih penting bagi Australia di masa kini. Melihat dinamika Asia yang lebih bergejolak, ekonomi dan militer Indonesia yang lebih kuat, menyebabkan Australia mengalami ketakutan yang lebih namun disisi lain Australia menaruh harapan untuk membentuk hubungan yang semakin erat dengan Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki arti begitu penting bagi Australia, hal tersebut tidak terlepas dari aspek strategis dan geografis. Yakni berkaitan dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara terdekat Australia yang memiliki komposisi penduduk dengan jumlah yang begitu besar. Selain itu Indonesia merupakan anggota dari G20 dan jembatan diplomasi Australia dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, posisi geografis Indonesia merupakan penyangga bagi faktor kekhawatiran keamanan Australia, dimana ruang udara serta jalur pelayaran dan mobilitas perdagangan internasional Australia melalui wilayah Indonesia.

Faktor-faktor tersebut yang membuat Australia terus berusaha menjaga hubungan dengan Indonesia dengan melakukan berbagai kerjasama dalam berbagai permasalahan regional dan global, seperti kerjasama pembangunan, pencarian suaka, serta perubahan iklim. Pentingnya Indonesia bagi Australia nampak jelas tercermin dari besarnya bantuan yang dikucurkan Australia sejak 1960-an. (McDougall, 2015)

D. Kebijakan Indonesia Terhadap Dana Bantuan Asing

Ketergantungan Indonesia terhadap bantuan asing memiliki keterkaitan erat dengan posisi politik dan kekayaan ekonominya, khususnya pada berkurangnya PDB Indonesia. Sejak keadaan ekonomi Indonesia mulai mengalami perbaikan pada tahun 1970-an, bantuan terhadap Indonesia mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 1988 sebanyak 6,5% dari PDB karena faktor penurunan harga minyak dan pemasukan dari gas. Berkali-kali mengalami fluktuasi terhadap prosentase bantuan asing, hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi dan politik di Indonesia.

Sejak tahun 1966 sampai dengan 1991, Indonesia telah menerima bantuan luar negeri dari 20 negara dan 13 lembaga multilateral yang sebagian besar merupakan anggota dari Kelompok

Antar Pemerintah di Indonesia (IGGI). Pasca pembubaran IGGI, Rezim Suharto menggantikannya dengan Kelompok Konsultatif Indonesia (CGI) dengan mengecualikan Belanda dan diketuai oleh Bank Dunia sampai tahun 2005 diambil alih oleh Pemerintah Indonesia.

Konsorsium 30 kreditur dan Multilateral termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan negara-negara seperti Jepang dan Amerika serta termasuk Australia. Melalui CGI pemberi pinjaman mengarahkan sumbangan mereka ke sektor-sektor ekonomi yang pada akhirnya memberikan keuntungan pada ekonomi mereka sendiri, memaksa persyaratan yang berat dan meningkatkan beban utang Indonesia. Pasca kekayaan Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2000-an, ketergantungan Indonesia terhadap bantuan asing mengalami penurunan. Pada tahun 2004, rasio bantuan turun drastis dari tahun 1990-an hingga lebih dari 1% dari PDB.

Tahun 2007 Indonesia resmi membubarkan CGI, dengan demikian pembubaran CGI merupakan sebuah langkah penting dalam memungkinkan Indonesia menenukan prioritas pembangunannya sendiri dan memberikan ketegasan kemandirian politik. Setelah pembubaran tersebut, Indonesia mmprioritaskan kerjasama dengan ADB, Bank Dunia dan Jepang. Sejak tahun 2009, Australia memfokuskan diri untuk menjadi donator terbesar di Indonesia dibawah Jepang, meski kontribusi Australia hanya setengah dari bantuan Jepang, Australia menjadi donor pilihan Indonesia. (Brooke Wilmsen & Sumarto, 2017)

Pada ketetapan MPR RI No. IV/MPR 1991 mengenai Garis-GARIS Besar Haluan Negara (GBHN), pada tahun 1999-2004 memberikan amanat agar pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi sebagaimana tertuang pada bab IV Arah Kebijakan Butir B (angka 7, 9 , dan 23) . Meski begitu pada tahun 1997 ketergantungan pada bantuan luar negeri justru bertambah dengan pemberian bantuan oleh IMF. Lalu pada ketetapan MPR RI No. II/MPR/2002 mengenai Rekomendasi kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan

rekomendasi supaya dilakukannya evaluasi kebijakan untuk menghindari ketergantungan terhadap negara donor berkelanjutan. (Bilateral, 2009)

Tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2008, tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing. Dalam UU tersebut menunjukan mengenai bentuk-bentuk dari bantuan asing beserta definisinya dan juga UU lain yang berkaitan dengan Undang-undang mengenai peraturan dan hubungannya dengan asing. UU tersebut adalah upaya penertiban administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1935 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Data mengenai kebijakan Indonesia terhadap dana hibah tertulis dalam Buku Saku Hibah tahun 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tertuang dalam Profil Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat. Didalamnya tertulis mengenai rincian dari latar belakang, strategi pemanfaatan, prinsip penerimaan, jenis dan landasan hukum hibah. Dengan kata lain, saat ini Indonesia sudah bersikap hati-hati terhadap dana bantuan asing dan melakukan upaya-upaya agar tidak lagi bergantung pada dana bantuan asing, sehingga kedepannya Indonesia akan terus memajukan diri dengan mandiri tanpa campur tangan asing. (Hibah, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- AIP-EID. (2015). Australian Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases. *ACHIEVEMENTS OF THE AIP-EID ANIMAL HEALTH PROGRAM 2011-2015*, 8.
- AIPJ. (2018). Konferensi Kemitraan Mencapai Keadilan Restoratif. <https://aipj.or.id/pages/gallery/konferensi-kemitraan> (diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.35 WIB).
- AusAid : Kemenkes. (2014). *Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu dan Penilaian Awal*. https://www.slideshare.net/pjj_kemenkes/kb-1-konsep-bencana-47565649 (diakses pada 5 Agustus 2018 pada pukul 21.49 WIB).
- Australia Embassy Indonesia. (n.d.). *Development partnership with Indonesia*. Jakarta: <http://france.embassy.gov.au/jakt/cooperation.html>.
- Bappenas. (2014). *Peningkatan Pendapatan Petani Miskin di Indonesia Timur* (diakses pada 30 Juli 2018 pada pukul 18.45). Nusa Tenggara Timur: <https://www.flickr.com/photos/aip-prisma/15294258546/in/photostream>.
- Bilateral, D. P. (2009). Pengelolaan Pendanaan Bantuan Luar Negeri dalam Rangka Mengurangi Ketergantungan Pada Pinjaman Luar Negeri. *Bappenas*, 3.
- Brooke Wilmsen, A. K., & Sumarto, M. (2017). The Development of Indonesian Social Policy in The Context of Overseas Development Aid. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)*, 12-13.
- Departemen Pertahanan. (2013). *Buku Putih Pertahanan 2013*. Canberra: Pemerintah Australia.
- Eldridge, P. J. (1979). *Indonesia and Australia : the politics of aid and development since 1966*. Canberra: The Australia National University.
- Government, A. (2015). Aid Investment Plan Indonesia : 2015-16 to 2018-19. *DFAT*.
- Hibah, B. S. (2015). *Profile Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat*. Jakarta: httKementerian Keuangan Republik Indonesia .
- Katigade. (2014). Sosialisasi dan Pengacakan Sekolah Uji Coba Kebijakan KIAT Guru. <https://katigade.wordpress.com/2014/10/28/sosialisasi-dan-pengacakan-sekolah-uji-coba-kebijakan-kiat-guru/> (diakses pada 5 Agustus 2018 PUKUL 21:55 WIB).
- KSI-Indonesia. (2018). LAN-KSI Synergize To Optimize Knowledge Management. <http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/lan-ksi-synergize-to-optimize-knowledge-management> (diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.41 WIB).
- Lampung, T. (2015). KOMPAK Gelar Dialog dengan IPPMI Lampung. <https://www.teraslampung.com/kompak-gelar-dialog-dengan-ippmi-lampung/> (diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.30 WIB).
- Maulidina, S. (2009). Pengukuran Kinerja Program Government Partnership Fund. *FISIP UI*.

- McDougall, D. (2015). Australia and The Developing World Under Abbott Coalition Government. *The Round Table*.
- NTB, F. (2017). *Workshop Masukan PMC Pada Paket Pekerjaan Kontrak dan Swakelola PRIM 2017 Dinas PUPTR Kab. Lobak*. Lobak:
<https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjikbCtgtbcAhVEWrwKHeEmC1wQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fllaj.ntbprov.go.id%2Fnode%2Farticle%2Fdetail%2F154&psig=AOvVaw3mHyfzYJB4Gmf3ehW0yYpA&ust=1533561794079953>.
- Palladium. (2016). *INOVASI announces Innovation Drive winners and launches work in West Nusa Tenggara*. Sumbawa: <http://thepalladiumgroup.com/who/news/INOVASI-announces-Innovation-Drive-winners-and-launches-work-in-West-Nusa-Tenggara> (diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.11 WIB).
- Pamsimas, S. C. (2013). Penggunaan Logo AusAID dalam Program PAMSIMAS (diakses pada 23 Juli 2018 pukul 18.30 WIB). *PAMSIMAS*, 8.
- PPN/Bappenas, K. (2017). Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program Mampu Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/> (diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.25 WIB).
- Trade, D. o. (2017). Overview of Australia's Aid Program to Indonesia. *Development Assistance in Indonesia* .